

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-BPHTB
(ELEKTRONIK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI



Oleh :

**NPM : 220210002
NAMA : TRIA VEBYANA
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026**

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-BPHTB
(ELEKTRONIK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENYUSUN SKRIPSI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



Oleh :

**NPM : 220210002
NAMA : TRIA VEBYANA
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tria Vebyana

NPM : 220210002

Tempat/Tgl Lahir : Koto Tuo, 31 Desember 2003

Alamat : Dusun Air Mancur

Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul **“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-BPHTB (ELEKTRONIK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya, gagasan, atau pendapat orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sumbernya dalam naskah dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran etika keilmuan atau unsur plagiarisme, saya bersedia menerima segala risiko dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 20 Juni 2026



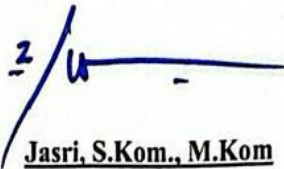
Tria Vebyana

PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

N P M : 220210002
Nama : Tria Vebyana
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Perancangan Sistem Informasi E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Kuantan Singingi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Jasri, S.Kom., M.Kom

NIDN. 1001019001

Tanggal. 14 Juli 2026

Pembimbing II,


Aprizal, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1022069203

Tanggal. 14 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Prodi Teknik Informatika



Helmi Nopriadi, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1030118303

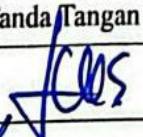
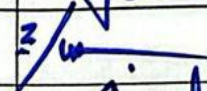
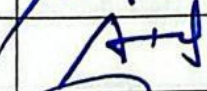
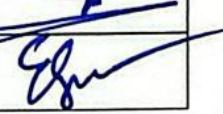
Tanggal. 14 Juli 2026

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NPM : 220210002
Nama : Tria Vebyana
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Perancangan Sistem Informasi E-BPHTB (Elektronik
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Di Kabupaten
Kuantan Singingi

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Universitas Islam Kuantan Singingi
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Dewan Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Candra, ST., M.Si	Ketua	
2	Jasri, S.Kom., M.Kom	Pembimbing I	
3	Aprizal, S.Kom., M.Kom	Pembimbing II	
4	Harianja, S.Pd., M.Kom	Penguji I	
5	Elgamar, S.Kom., M.Kom	Penguji II	


Dekan,
Fakultas Teknik
Agus Candra, ST., M.Si
NIDN.1020088701

Mengetahui,

Ketua,
Program Studi Teknik Informatika
Helmi Napriandi, S.Kom., M.Kom
NIDN.10300118303

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-BPHTB (ELEKTRONIK BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi E-BPHTB yang mampu membantu proses pendaftaran, verifikasi, pengelolaan data wajib pajak, perhitungan BPHTB, hingga penyusunan laporan secara terkomputerisasi. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi untuk memperoleh kebutuhan sistem. Adapun metode pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall yang terdiri atas tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Perancangan sistem dilakukan menggunakan Unified Modeling Language (UML), sedangkan implementasi sistem menggunakan teknologi berbasis web dengan database sebagai media penyimpanan data. Hasil penelitian berupa rancangan Sistem Informasi E-BPHTB yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data BPHTB, mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak, meminimalkan kesalahan dalam penginputan dan perhitungan data, serta mempermudah pembuatan laporan secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan BPHTB pada BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih transparan, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, E-BPHTB, BPHTB, BAPENDA, Waterfall, UML.

**DESIGN OF THE E-BPHTB (ELECTRONIC DUTY ON THE
ACQUISITION OF RIGHTS ON LAND AND BUILDINGS)
INFORMATION SYSTEM AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY
(BAPENDA) OF KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ABSTRACT

This study aims to design an E-BPHTB Information System capable of facilitating the entire process from registration, verification, and taxpayer data management to BPHTB calculation and computerized report generation. Research methods employed include observation, interviews, literature review, and documentation to identify system requirements. The system development follows the Waterfall methodology, comprising stages for requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. System design utilizes the Unified Modeling Language (UML), while implementation relies on web-based technology with a database for data storage. The study results in an E-BPHTB Information System design capable of enhancing the effectiveness of BPHTB data management, accelerating service delivery to taxpayers, minimizing data entry and calculation errors, and facilitating the rapid, accurate, and integrated generation of reports. This system is expected to make BPHTB services at BAPENDA Kuantan Singingi Regency more transparent and efficient, thereby supporting improved public service quality.

Keywords: Information System, E-BPHTB, BPHTB, BAPENDA, Waterfall, UML.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Tria Vebyana
Tempat, Tanggal Lahir : Koto Tuo, 31 Desember 2003
Alamat : Dusun Air Mancur
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Amir Yusman
Nama Ibu : Almh. Hasmiah
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Dusun Air Mancur

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2009-2010 : TK Almukhlisin Kopah
2. Tahun 2010-2016 : SDN 016 Kopah
3. Tahun 2016-2019 : SMP Negeri 5 Teluk Kuantan
4. Tahun 2019-2022 : SMA Negeri 1 Teluk Kuantan
5. Tahun 2022-2026 : Universitas Islam Kuantan Singingi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Perancangan Sistem Informasi E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Kuantan Singingi”**. Atas tersusun Proposal ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Zulfan Sa'am, M.Si.** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau.
3. Bapak **Agus Candra, S.T., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau.
4. Bapak **Helpi Nopriadi, S.Kom., M.Kom.**, Ketua Program Studi Teknik Informatika .
5. Bapak **Jasri, S.Kom., M.Kom.**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Aprizal, S.Kom., M.Kom.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Cinta pertamaku serta panutanku, Ayah Amir Yusman. Terima kasih telah menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih untuk segala perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis serta memberikan pendidikan sampai sarjana. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bakti dan cinta kepada ayah.
8. Kepada Pintu Surgaku ibunda tercinta, Almh. Hasmiah ibu yang selalu penulis rindukan dan penulis cintai. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, semoga ibu melihat putri kecil ibu dari tempat terbaik disisinya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada ibu.
9. Kepada Saudara laki-lakiku tersayang, Napriyon dan Wido Riksandi, S.Sos terima kasih telah menjadi teladan dalam keteguhan, penompang dalam sunyi, dan penyemangat dalam tiap Langkah penulis. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang tak pernah surut kepada adik kecilnya yang selalu dianggap kecil dan tidak pernah dewasa. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai janji dan bakti cinta kepada kalian.
10. Kepada Adikku Tersayang Luthfiah Mufidah, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap Langkah perjuangan penulis. Meski sering menjadi musuh dalam hal-hal kecil sehari-hari, namun dibalik itu semua, kaulah alasan terbesar penulis untuk terus

berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menjadi sosok kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggungjawab dan kasih sayang padamu. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap kuat hingga saat ini.

11. Teruntuk Sahabat kecilku Herawati Musni dan Aidilia Putri, Terima kasih telah menjadi sahabat yang penuh cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dikala suka maupun duka, tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta semangat disetiap proses penulis. Semoga segala kebaikan, ketulusan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dalam setiap perjalanan hidupmu.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Teknik Informatika yang terus memberikan bantuan dan *support*.
13. Terakhir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana dengan sejuta keraguan, Tria Vebyana terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. **Saya bangga pada diri saya sendiri!** Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik untuk hari ini dan hari esok.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pihak universitas, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Teluk Kuantan, 20 Juni 2026

Penulis



Tria Vebyana

NPM. 220210002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Sistem.....	8
2.1.2 Informasi	9
2.1.3 Sistem Informasi	9
2.1.4 E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)....	11
2.1.5 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	11
2.1.6 Teknologi Web	22
2.1.7 PHP (Hypertext Preprocessor)	22
2.1.8 MySQL (MY Structure Query Language)	23
2.1.9 HTML (Hyper Text Markup Language).....	24
2.1.10 CSS (Cascading Style Sheets).....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Uraian Tempat Penelitian	29
3.1.1 Sejarah Singkat Tempat Penelitian	30
3.1.2 Struktur Organisasi	31
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.....	32
3.2 Diagram Alur Penelitian.....	57
3.3 Metode Penelitian.....	61
3.4 Teknik Pengumpulan Data	63

BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram.....	13
Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram.....	16
Tabel 2.3 Simbol Class Diagram.....	19
Tabel 2.4 Simbol Flowchart	21
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	32
Gambar 3. 2 Diagram Alur Penelitian.....	58
Gambar 3. 3 Metode Waterfall	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sebagai instansi strategis dalam mendukung pembangunan daerah, Bapenda bertanggung jawab memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan akuntabel, Bapenda dituntut mampu menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan digital saat ini. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan BPHTB membutuhkan proses administrasi yang akurat, cepat, terstruktur, serta transparan, mengingat BPHTB berkaitan dengan dokumen legal, nilai transaksi, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang harus dihitung dan diverifikasi secara cermat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Oleh karena itu, Penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kinerja Bapenda yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat[1].

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ialah pajak yang dikenakan untuk setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik

dikarenakan pemindahan hak dari orang pribadi atau badan hukum kepada orang pribadi atau badan hukum lainnya maupun pemberian hak baru oleh pemerintah atau Negara kepada orang pribadi maupun badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB baik dalam menentukan besaran nilai, cara penyetoran, hambatan yang dihadapi dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarnya. Hambatan yang timbul biasanya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adanya upaya untuk menghindari pajak, dan yang terakhir ialah tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Disarankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan pada pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan terlebih dahulu tentang pentingnya pembayaran pajak khususnya BPHTB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang - undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach)[2].

Pada kondisi saat ini, sebagian proses pelayanan BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi masih dilakukan secara manual melalui pendaftaran berkas secara langsung di kantor Bapenda. Mekanisme tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti antrean panjang, ketergantungan pada kehadiran wajib pajak, serta tingginya risiko kesalahan dalam penginputan data akibat proses pencatatan yang masih dilakukan secara konvensional. Selain itu, proses verifikasi yang memakan waktu, kesulitan dalam pemantauan dokumen, serta kurangnya transparansi terhadap status permohonan bagi wajib pajak dan PPAT menjadi

kendala utama dalam pelayanan. Kondisi ini juga menyebabkan alur kerja menjadi kurang efisien karena setiap tahapan harus dilakukan secara bertahap dan manual tanpa dukungan sistem terintegrasi. Proses yang belum terstandarisasi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data dan menurunkan tingkat akuntabilitas, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi serta membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prosedur. Dampak lainnya adalah pencatatan pendapatan BPHTB yang kurang optimal serta rentan terhadap duplikasi dan ketidaksinkronan data.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk melakukan digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui sistem elektronik. Penerapan E-BPHTB diharapkan dapat mendukung pendaftaran, pengunggahan dokumen, perhitungan NJOP, perhitungan BPHTB, verifikasi petugas, hingga pembayaran secara online melalui kanal resmi. Sistem digital juga mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan akses 24/7 kepada masyarakat[3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa perancangan sistem informasi E-BPHTB berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan BPHTB. Sistem ini diharapkan dapat membantu Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan proses administrasi secara lebih cepat, tepat dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Perancangan Sistem Informasi E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelayanan dan Penginputan data BPHTB masih dilakukan secara konvensional sehingga menyebabkan antrean dan keterlambatan pelayanan dan menimbulkan kesalahan data.
2. Perhitungan NJOP dan BPHTB belum terotomatisasi sehingga memperlambat proses verifikasi.
3. Wajib pajak tidak dapat memonitor status permohonan BPHTB secara langsung.
4. Kurangnya transparansi yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar (pungli).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan proses pelayanan BPHTB yang masih dilakukan secara manual pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk antrean, keterlambatan pelayanan, dan kurangnya transparansi bagi wajib pajak?
2. Bagaimana sistem dapat melakukan perhitungan otomatis NJOP dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku?

3. Bagaimana merancang sistem informasi E-BPHTB berbasis web dan melakukan perhitungan otomatis NJOP dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan pelayanan pendaftaran, verifikasi, dan pembayaran secara online?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses bisnis pengelolaan BPHTB pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan sistem pada proses pelayanan BPHTB manual.
3. Merancang sistem informasi E-BPHTB berbasis web yang menyediakan fitur pendaftaran, pengunggahan dokumen, verifikasi petugas, perhitungan otomatis NJOP dan BPHTB, serta pembayaran online.
4. Menghasilkan desain sistem yang dapat menjadi acuan implementasi oleh Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai perancangan sistem informasi pajak daerah.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian terkait digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor perpajakan daerah.

3. Mendukung modernisasi layanan, meningkatkan efisiensi verifikasi, dan meningkatkan akurasi pencatatan pendapatan BPHTB.
4. Mempermudah proses pengajuan BPHTB secara online tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
5. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan potensial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan tidak meluas dan tetap fokus pada perancangan sistem informasi E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Fokus penelitian pada perancangan sistem informasi E-BPHTB, tidak mencakup implementasi penuh maupun integrasi lintas instansi.
2. Sistem mencakup fitur pendaftaran, pengunggahan dokumen, perhitungan NJOP dan BPHTB, verifikasi, dan pembuatan bukti pembayaran.
3. Data acuan berupa tabel NJOP, NPOPTKP, dan ketentuan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sistem dirancang berbasis web dengan pendekatan model pengembangan prototype.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dari setiap bab yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Berisi latar belakang, rumusan masalah tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori pendukung dan penelitian terdahulu yang relevan dengan perancangan sistem informasi berbasis web.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, teknik pengumpulan data, model pengembangan sistem, dan analisis kebutuhan sistem.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisa sistem, perancangan sistem, *database* dan rancangan antarmuka.

BAB V : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini menjelaskan penerapan sistem, kebutuhan *hardware* dan *software*, serta tampilan sistem berdasarkan hak akses pengguna.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat daftar referensi berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian akhir penelitian yang berisi dokumen pendukung seperti data, gambar, tabel, atau informasi yang memperkuat isi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian. Landasan teoritis memberikan pemahaman konseptual terhadap variabel dan sistem yang digunakan, seperti konsep sistem, informasi, sistem informasi, sistem informasi elektronik, model perancangan sistem, serta teknologi yang digunakan dalam perancangan sistem informasi.

2.1.1 Sistem

Sistem merupakan suatu tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus yang berkaitan dan kemudian secara bersama - sama memiliki tujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu[4].

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada didalam sistem tersebut[4].

sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama - sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu[12].

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan sistem adalah serangkaian komponen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu[12].

2.1.2 Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses atau memiliki arti. Adapun karakteristik penting yang harus dimiliki oleh informasi, seperti: relevansi, akurat, ketepatan waktu, dan kelengkapan[4].

Informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Informasi merupakan data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi ataupun siapa saja yang membutuhkan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima[12].

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah data yang diolah dari satu atau berbagai sumber yang memberikan nilai dan manfaat bagi penerima[12].

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang disusun guna memberikan suatu informasi yang tepat waktu untuk manajemen yang berkaitan dengan lingkungan di luar organisasi dan juga kegiatan operasi di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan bagi proses manajemen dan memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan serta menunjang proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya sistem informasi dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur (*formal*) dan sistem yang tidak terstruktur (*nonformal*). Sistem *formal* merupakan suatu sistem yang dijalankan sesuai dengan norma-norma organisasi yang berlaku untuk semua kalangan masyarakat, sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Sistem *formal* ini bergantung pada tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang telah dibebankan kepada pejabat organisasi. Sedangkan sistem *nonformal* merupakan sistem yang berlaku pada suatu lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi, akan tetapi masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi tersebut.

Sistem informasi juga merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian *internal* dan *external* yang penting serta menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat[4].

Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan distribusikan ke pengguna. Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi, akan menyampaikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi[12].

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah serangkaian prosedur-prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses

menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam organisasi[12].

2.1.4 E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan E-BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik[5].

Berdasarkan definisi tersebut, sistem informasi E-BPHTB merupakan suatu sistem pemungutan dan pengolahan BPHTB yang dilakukan secara elektronik, dimana proses pengajuan, verifikasi, perhitungan, hingga penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah dilakukan melalui aplikasi atau platform digital. Dengan adanya E-BPHTB, Masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

2.1.5 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah *software* yang berorientasikan pada objek. UML adalah sebuah bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah distandarisasi sebagai media penulisan cetak biru (*blueprints*) perangkat lunak (*pressman*). UML merupakan sebuah standar penulisan atau semacam *blue print* dimana didalamnya termasuk sebuah bisnis proses, penulisan kelas - kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik[4].

1. Use Case Diagram

Use case diagram yaitu model hasil analisis perancangan sistem yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersebut akan diterapkan oleh pengguna sehingga perancangan sistem dapat tergambarkan. *Use case* diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dengan aktor. Oleh karena itu sangat penting untuk memilih abstraksi yang sesuai dengan kebutuhan. *Use case* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara admin dan user dari sebuah sistem dengan melalui sebuah diagram bagaimana sebuah sistem dipakasi.

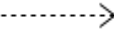
Sebuah *use case* diagram menyatakan visualisasi interaksi yang terjadi antara pengguna (*aktor*) dengan sistem. Diagram ini bisa menjadi gambaran yang bagus untuk menjelaskan konteks dari sebuah sistem sehingga terlihat jelas batasan dari sistem. Ada 2 elemen penting yang harus digambarkan, yaitu *aktor* dan *use case*. *Aktor* adalah segala sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem, bisa merupakan orang (yang ditunjukkan dengan perannya dan bukan namanya/personalnya) atau sistem komputer yang lain. *Aktor* dinotasikan dengan simbol gambar orang-orangan (*stick-man*) dengan nama kata benda di bagian bawah yang menyatakan peran atau sistem. *Aktor* bisa bersifat *primer*, yaitu yang menginisiasi berjalannya sebuah *use case*, atau sekunder, yaitu yang membantu berjalannya sebuah *use case*. *Use case* dinotasikan dengan simbol *elips* dengan nama kata kerja aktif di bagian dalam yang menyatakan aktivitas dari *perspektif aktor*. Setiap *aktor* dimungkinkan untuk berinteraksi dengan sistem dalam banyak *use case*. Sebaliknya, setiap *use case* bisa dijalankan oleh lebih dari satu *aktor*.

Antar *aktor* maupun antar *use case* bisa memiliki relasi, masing - masing dengan spesifikasi yang berbeda. Sebuah *use case*, disebut dengan *base use case*, bisa memiliki relasi dengan satu atau lebih *use case* yang lain, disebut dengan *supplier use case*, dalam bentuk *extend* dan *include*. Relasi *extend* menyatakan bahwa fungsionalitas dari *base use case* bisa diperluas oleh *supplier use case*, jika dibutuhkan, di dalam eksekusi alur alternatif yang ada pada *use case scenario* dari *base use case*. Sedangkan, relasi *include* menyatakan bahwa fungsionalitas dari *base use case* selalu hanya bisa dipenuhi dengan bantuan dari *supplier use case* di dalam eksekusi alur utama yang ada pada *use case scenario* dari *base use case*. Dalam hal ini, relasi *include* dan *extend* tidak menjelaskan urutan eksekusi apapun antara *base use case* dan *supplier use case*, baik dalam alur utama maupun alternatif yang dijelaskan dalam *use case scenario* dari *base use case*. Selanjutnya, sebuah *aktor*, disebut *aktor induk*, bisa memiliki relasi dengan *aktor* yang lain, disebut *aktor turunan*, yang menyatakan bahwa sebuah *aktor* merupakan turunan dari *aktor* yang lain. *Aktor turunan* akan memiliki hak akses terhadap fungsionalitas sistem yang lebih luas dibandingkan dengan *aktor induk*[4].

Tabel 2. 1 Simbol Use Case Diagram

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1.		<i>Actor</i>	Aktor: Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah

		gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal <i>frase</i> nama aktor. Aktor merupakan peran yang dimainkan oleh pemakai ketika berinteraksi dengan sistem.
2.	<i>Association</i>	Asosiasi atau <i>association</i> Komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor.
3.	<i>Extend</i>	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dan <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>use case</i> tambahan itu; mirip dengan prinsip <i>inheritance</i> pada pemrograman berorientasi objek; biasanya <i>use case</i> tambahan memiliki nama depan yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan.
4.	<i>Generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.

5.		<i>Include</i>	<i>Include</i> berarti <i>use case</i> yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah <i>use case</i> yang ditambahkan telah dijalankan sebelum <i>use case</i> tambahan dijalankan.
6.		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
7.		Use case	<i>Use case</i> merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.
8.		System	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
9.		Collaboration	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>).
10.		Note	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.

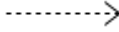
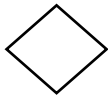
2. Activity diagram

UML (*Unified Modelling Language*) adalah bahasa model standar untuk pengembangan cetak biru perangkat lunak. Salah satu diagram UML adalah *activity diagram*. Pada UML, simbol merupakan *stereotype* aktivitas dari suatu *activity diagram*. Pada *activity diagram*, suatu proses mengambil *input* berupa sumber daya dari sebelah kiri kemudian mengindikasikan *outputnya* pada sebelah kanan.

Activity diagram menggambarkan aliran fungsionalisme dalam suatu sistem informasi. Secara lengkap, *activity diagram* mendefinisikan dimana *workflow* dimulai, dimana berhentinya, aktivitas apa yang terjadi selama *workflow*, dan bagaimana urutan kejadian aktivitas tersebut. *Activity diagram* juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Bagi mereka yang akrab dengan analisis dan desain struktur tradisional, diagram ini menggabungkan ide-ide yang mendasari diagram alir data dan diagram alur sistem[4].

Tabel 2. 2 Simbol Activity Diagram

No.	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1.		Activity	Menyatakan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2.		Control Flow	Menunjukkan urutan eksekusi.

3.		Object Flow	Menunjukkan aliran objek dari sebuah action atau activity ke action.
4.		Start Point	Menyatakan bahwa sebuah object dibentuk atau diawali.
5.		End Point	Menyatakan bahwa sebuah objek dibentuk atau diakhiri.
6.		Join/Penggabungan	Menyatakan untuk menggabungkan kembali activity atau action yang parallel.
7.		Fork	Menyatakan untuk memecahkan behavior menjadi activity atau action yang parallel.
8.		Decision	Menunjukkan penggambaran suatu keputusan/tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu.

3. Class Diagram

Class diagram adalah merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan- aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Jadi dapat dikatakan bahwa Class Diagram adalah visual dari struktur sistem

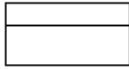
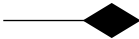
program pada jenis-jenis yang di bentuk. Class Diagram merupakan alur jalannya sebuah database pada system yang akan dibangun atau dibuat. Class diagram juga disebut kumpulan dari beberapa class dan relasinya. Class identik dengan entity yang direpresentasikan dalam bentuk persegi dimana pada bagian atas ditulis nama class, kemudian ke bawah ditulis attribute yang terdapat pada class, kemudian ke bawah lagi ditulis metode yang ada pada class. Sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek.

Selama proses analisis, *class diagram* memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, *class diagram* berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur yang dibuat dapat membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. *Class Diagram* memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap- tiap kelas di dalam model desain (dalam *logical view*) dari suatu sistem.

Atribut dan operasi merupakan bagian dari *Class Diagram* yang dapat memberi gambaran hubungan antara perancangan dan perangkat lunaknya sehingga sesuai dengan pembuatan programnya. *Class Diagram* secara khas meliputi: Kelas (*Class*), *Relasi Associations*, *Generalization* dan *Aggregation*, atribut (*Attributes*), operasi (*operation/method*) dan *visibility*, tingkat akses objek eksternal kepada suatu operasi atau atribut. Hubungan antar kelas mempunyai keterangan yang disebut dengan *Multiplicity* atau *Cardinality*. *Class Diagram* menggambarkan serta deskripsi dari *class*, atribut dan objek

serta hubungan satu sama lain. *Class Diagram* dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari *class* yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa *class diagram*. *Class Diagram* sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Diagram ini umum digunakan pada pemodelan sistem. *Class Diagram* berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek yang lain[4].

Tabel 2. 3 Simbol Class Diagram

NO	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1.		Class	Class adalah blok-blok pembangunan pada pemrograman berorientasi objek.
2.		Association	Association adalah sebuah hubungan yang menunjukkan adanya interaksi antar class.
3.		Aggregation	Aggregation mengindikasikan keseluruhan bagian relationship dan biasanya disebut relasi.
4.		Composition	Jika sebuah class tidak bisa berdiri sendiri dan harus merupakan bagian dari class yang lain, maka class tersebut memiliki relasi composition terhadap class tempat

		dia bergantung tersebut. Sebuah relationship composition digambarkan sebagai garis dengan ujung terbentuk jajaran genjang berisi/solid.
5.	 Generalization	Generalization adalah sebuah hubungan antar class yang bersifat dari khusus ke umum.
6.	 Dependency	Digunakan untuk menunjukkan operasi pada suatu class yang menggunakan class yang lain. Sebuah dependency dilambangkan sebagai sebuah panah bertitik-titik.

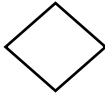
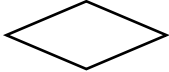
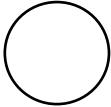
4. Flowchart

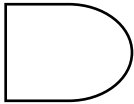
Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk

menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung.

Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Selain itu, ketika ada penambahan proses baru dapat dilakukan dengan mudah menggunakan flowchart ini. Setelah proses membuat flowchart selesai, maka giliran programmer yang akan menerjemahkan desain logis tersebut kedalam bentuk program dengan berbagai bahasa pemrograman yang telah disepakati[6].

Tabel 2. 4 Simbol Flowchart

No.	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
1.		Terminal	Digunakan untuk memulai dan mengakhiri program
2.		Decision	Digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu.
3.		Input/Output	Digunakan untuk menyatakan input dan output tanpa melihat jenisnya.
4.		Processing	Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer
5.		Connector	Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke

		proses berikutnya dihalaman yang sama.
6.		Display Digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor.

2.1.6 Teknologi Web

Teknologi *web* adalah *tools* yang digunakan untuk membuat aplikasi multi platform berbasis web yang dapat diakses dari bermacam-macam *web browser* pada sistem operasi yang berbeda. Aplikasi berbasis *web* ini dapat dikembangkan dengan menggunakan Bahasa pemrograman *HTML*, *CSS* dan *Javascript*. Aplikasi berbasis *web* biasanya digambarkan sebagai aplikasi multi *platform* karena aplikasi dapat diakses dari berbagai *web browser* pada sistem operasi yang berbeda. Aplikasi *web* umumnya menggunakan arsitektur sistem *client-server*, dan memiliki kompleksitas dan fungsionalitas yang sangat bervariasi[6].

2.1.7 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP atau kependekan dari *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu bahasa pemrograman *open source* yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan *web* dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti *C*, *Java*, dan *Perl* serta mudah untuk dipelajari. PHP merupakan bahasa *scripting server-side*, dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server.

Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari halaman *website* oleh *browser*. Berdasarkan URL atau alamat *website* dalam jaringan internet, *browser* akan menemukan sebuah alamat dari *webserver*, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh *webserver*. Selanjutnya *webserver* akan mencari berkas yang diminta dan menampilkan isinya di browser. *Browser* yang mendapatkan isinya segera menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang dipanggil oleh *user* adalah halaman yang mengandung *script* PHP? Pada prinsipnya sama dengan memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke *web-server*, *web-server* akan memeriksa tipe *file* yang diminta *user*. Jika tipe *file* yang diminta adalah PHP, maka akan memeriksa isi *script* dari halaman PHP tersebut[7].

2.1.8 MySQL (MY Structure Query Language)

MySQL (*MY Structure Query Language*) adalah salah satu dari sekian banyak DBMS seperti *Oracle*, *MS SQL*, *Postagre SQL*, dan lainnya. MySQL adalah sistem manajemen basis data yang menggunakan SQL untuk mengelola data. MySQL adalah database *open source*, yang artinya Anda dapat menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung atau support dengan Basis Data MySQL.

MySQL merupakan basis data yang paling digemari kalangan *programmer web*, dengan alasan bahwa program ini merupakan Basis Data yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah basis data *server* yang mampu untuk manajemen Basis Data dengan baik, mysql terhitung merupakan basis data yang paling digemari dan paling

banyak digunakan dibanding basis data lainnya. Selain mysql masih terdapat beberapa jenis basis data *server* yang juga memiliki kemampuan yang juga tidak bisa dianggap enteng, basis data itu adalah Oracle dan PostgreSQL[7].

2.1.9 HTML (Hyper Text Markup Language)

HTML (Hyper Text Mark Up Language) merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman *web*. HTML berfungsi untuk mempublikasi dokumen *online*. *Statement* dasar dari HTML disebut *tag*. Sebuah *tag* dinyatakan dalam sebuah kurung siku (<>). *Tag* yang ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari suatu dokumen haruslah dibuat berupa pasangan. Terdiri dari *tag* pembuka dan *tag* penutup. Dimana *tag* penutup menggunakan tambahan tanda garis miring (/) di awal nama *tag*[7].

2.1.10 CSS (Cascading Style Sheets)

Menurut “CSS (*Cascading Style Sheet*) merupakan salah satu bahasa *pemrograman web* yang bertujuan untuk membuat *website* agar lebih menarik dan terstruktur.” 9 Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa CSS adalah suatu bahasa *pemrograman web* yang berfungsi mengatur tampilan *teks* dan gambar dari suatu *website* agar terlihat lebih menarik dan terstruktur. Cara kerja CSS dalam memodifikasi HTML dengan memilih elemen HTML yang akan diatur kemudian memberikan *property* yang sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Dalam memberikan aturan pada elemen HTML, skrip CSS terdiri atas 3 bagian yaitu *selector* untuk memilih elemen yang akan diberi aturan, *property* yang merupakan aturan yang diberikan dan *value* sebagai nilai dari aturan yang diberikan[7].

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan sistem informasi berbasis elektronik pada bidang pajak daerah terbukti mampu meningkatkan kecepatan proses pelayanan, akurasi perhitungan pajak, serta efektivitas dalam pengelolaan data wajib pajak. Sistem yang dikembangkan pada penelitian sebelumnya juga dapat meminimalisir kesalahan input, mempercepat verifikasi berkas, dan meningkatkan transparansi proses pembayaran pajak.

Namun demikian, setiap penelitian memiliki karakteristik, kebutuhan, dan ruang lingkup yang berbeda-beda, sehingga hasil sistem yang telah dikembangkan sebelumnya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan untuk merancang sistem informasi E-BPHTB yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi, alur kerja, serta kebutuhan pelayanan yang ada di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan BPHTB secara menyeluruh.

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1	Angga Adhinata Amrulloh,Maulid yati Aisyah	Analisis efektivitas penerapan sistem E- BPHTB Pada Badan Pendapatan, pengelolaan	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, evektifitas penerapan Sistem E-BPHTB di Kabupaten Magelang telah berjalan sangat baik, walaupun

	keuangan dan aset proses untuk memvalidasi daerah di kabupaten berkas cukup lama. Selain itu, magelang bagian pegawai di BPPKAD pelayanan Kabupaten Magelang sudah memahami makna Sistem E-BPHTB secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk memvalidasi berkas-berkas wajib pajak pemerintah daerah. Sistem E-BPHTB mempermudah pegawai dalam proses validasi, pegawai tinggal mengecek kelengkapan berkas yang masuk sebelum ke tahapan pengklasifikasian[8].
2	Tsamarah Widad E-BPHTB: Penggunaan E-BPHTB dalam Wadhiah1), Moh. STRATEGI pemungutan pajak sudah Faisol2) MENINGKATKAN berjalan dengan baik, dan PENERIMAAN penerimaan pajak pada item BPHTB SELAMA BPHTB mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.

		PANDEMI COVID-19	Sebagai sistem baru, aplikasi E-BPHTB masih belum <i>familiar</i> bagi PPAT/Notaris dan membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi yang intens, supaya pemanfaatan sistem ini berjalan maksimal dan mampu meningkatkan efektifitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah[9].
3	Vivin Delvya Roza1,Febr Yuliani, Adianto	<i>Innovative Governance</i> Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Penerapan Aplikasi E-BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi)	Berdasarkan rumusan masalah dan uraian diatas terkait innovative governance dalam pelayanan perjakan melalui aplikasi E-BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan innovative governance dalam pelayanan perjakan melalui aplikasi E-BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurang baik. Karena belum sesuai dengan

kriteria best practice innovative governance yang dikemukakan oleh Sangkala dilihat melalui 6 kriteria keberhasilan. Aplikasi dan website E-BPHTB masih memiliki kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Kendala tersebut antara lain yaitu: Keterbatasan jaringan dalam penggunaan aplikasi E-BPHTB, ditemukan kekurangan tenaga ahli pada bidang IT dalam operasional aplikasi E-BPHTB di Bapenda Kuansing dan adanya kekurangan anggaran dalam pengembangan sistem aplikasi E-BPHTB[9].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Uraian Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi, instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemungutan, dan pelayanan berbagai jenis pajak daerah. Salah satu layanan penting yang dikelola oleh Bapenda adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi memiliki bidang pelayanan BPHTB, termasuk layanan E-BPHTB (Elektronik BPHTB) yang berfungsi untuk memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah secara digital. Namun, sebagian proses pelayanan BPHTB di Bapenda masih dilakukan secara manual, seperti pengajuan berkas secara langsung, verifikasi dokumen melalui tatap muka, dan pencatatan yang belum sepenuhnya terkomputerisasi. Kondisi ini sering menimbulkan antrean panjang, keterlambatan pelayanan, serta keterbatasan akses informasi bagi wajib pajak.

Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pada bagian pelayanan E-BPHTB, menjadi lokasi penelitian yang relevan. Lingkungan kerja ini memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung proses bisnis BPHTB, kebutuhan digitalisasi layanan, serta peluang pengembangan sistem informasi E-BPHTB yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3.1.1 Sejarah Singkat Tempat Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi utama pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cikal bakal lembaga ini berawal dari pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 1999, yang resmi berdiri sebagai daerah otonom setelah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak pemekaran tersebut, pemerintah kabupaten membentuk berbagai perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang pada waktu itu bertugas mengurus seluruh aspek pendapatan daerah.

Pada awal berdirinya, Dispenda Kuantan Singingi berfokus pada penyusunan sistem administrasi pendapatan, penarikan pajak daerah, dan pembangunan basis data wajib pajak. Seiring perkembangan tata kelola pemerintah daerah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, regulasi nasional terkait struktur organisasi perangkat daerah mengalami pembaharuan. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penyesuaian organisasi perangkat daerah di seluruh Indonesia berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan restrukturisasi perangkat daerah yang kemudian menetapkan perubahan Dispenda menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas dan fokus yang lebih terarah dalam mengelola pendapatan daerah secara profesional dan modern.

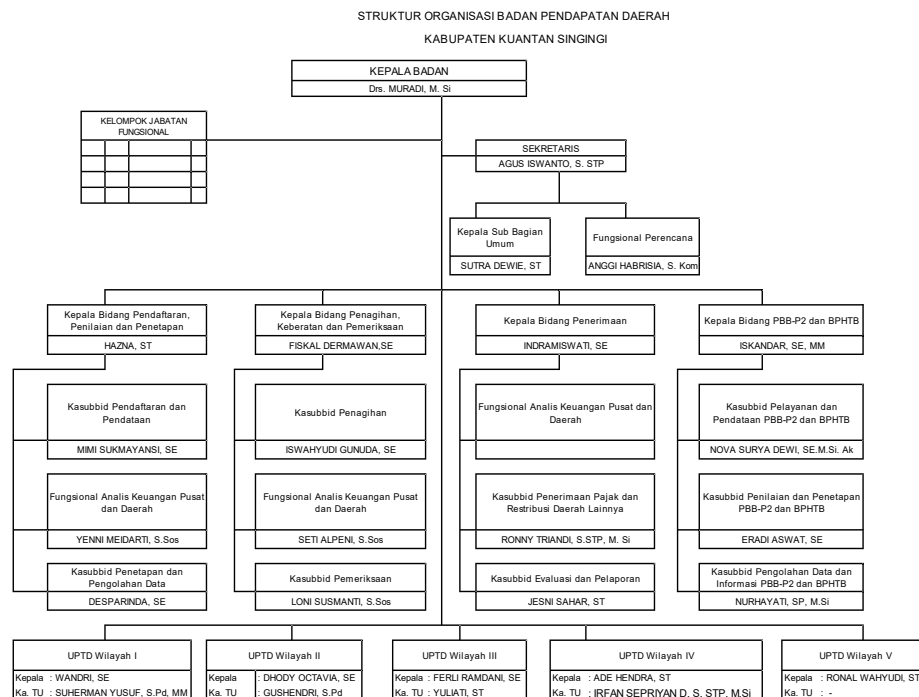
Bapenda Kuantan Singingi saat ini memegang tanggung jawab terhadap berbagai jenis pendapatan daerah, khususnya di bidang pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan pajak-pajak lainnya. Selain itu, Bapenda juga memiliki tugas dalam pengawasan, penatausahaan, pengendalian, serta penyusunan laporan pendapatan daerah.

Dalam perkembangannya, Bapenda Kuantan Singingi terus melakukan inovasi pelayanan publik, termasuk upaya digitalisasi melalui pengembangan sistem informasi perpajakan daerah. Langkah modernisasi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pemungutan pajak, kemudahan akses bagi masyarakat, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Dengan demikian, Bapenda memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.

3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian tugas, hubungan kerja, dan alur tanggung jawab dalam suatu lembaga. Dengan adanya struktur ini, setiap posisi memiliki peran dan kewenangan yang jelas sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung lebih tertata dan terkoordinasi. Struktur organisasi juga membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan, memudahkan proses pelaporan, dan mendukung tercapainya tujuan lembaga secara lebih efektif. Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan susunan unsur kepemimpinan dan perangkat kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,

fungsi, serta alur koordinasi di lingkungan Bapenda. Struktur ini disusun untuk memastikan setiap bidang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas dalam mendukung proses pengelolaan pendapatan daerah. Berikut merupakan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2024-2025

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pengaturan peran yang dirancang untuk memastikan setiap bidang dan subbagian menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan saling mendukung. Pengelompokan fungsi ini sangat diperlukan agar seluruh proses pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan

secara terarah, tertib, serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap unit kerja memahami ruang lingkup kewenangan, mekanisme koordinasi, serta kontribusi yang diharapkan dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, struktur yang tertata dengan baik memudahkan proses pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Berikut merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Kepala Badan

Drs. Muradi, M.Si

Tugas Pokok:

- a. Membantu bupati dalam perencanaan, pengkoordinasian, fasilitasi, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam urusan pemerintah dibidang keuangan sub bidang pendapatan daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, pajak dan retribusi.

- b. Pelaksanaan kebijakan

Menjalankan kebijakan strategis yang sudah disusun sesuai rencana.

- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Memantau pelaksanaan tugas, mengevaluasi capaian, serta membuat laporan tertulis.

d. Administrasi dan pengelolaan

Melaksanakan administrasi internal, pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, dan hal-hal administrative lainnya.

e. Koordinasi dan pembinaan

Mengkoordinasikan dan membina unit-unit di lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta menyelenggarakan Kerjasama antar perangkat daerah penghasil PAD.

2. Sekretaris

Agus Iswanto, S.STP

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah serta memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

- a. kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, dan pengelolaan asset Daerah.
- b. Penyusunan rencana, program dan anggaran, sekaligus evaluasi dan pelaporan sektor pendapatan daerah.
- c. Koordinasi urusan keuangan internal badan pendapatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai yang diberikan oleh kepala badan pendapatan daerah.

3. Kepala sub bagian umum

Sutra Dewie, S.T

Tugas pokok:

- a. Kepala sub bagian umum bertugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan Sebagian besar fungsi administrasi umum dan kepegawaian, mencakup perencanaan program, administrasi, inventaris, kehumasan dan keprotokolan, serta pelaporan rutin.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Anggaran

Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan).

- b. Pembagian tugas dan supervise Staf

Memberi disposisi, membina, dan mengawasi staf agar pelaksanaan tugas sesuai perundang-undangan.

- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan membuat laporan rutin kepada sekretaris

- d. Administrasi umum dan ketatausahaan

Mengelola surat masuk/keluar, naskah dinas, kearsipan, dokumentasi kegiatan dan urusan rumah tangga kantor

- e. Pengelolaan kepegawaian

Mengelola data pegawai, formasi, mutase, kenaikan pangkat/gaji, pension, dan administrasi pendukung lainnya.

4. Pungsional perencanaan

Anggi Habrisia, S.Kom

Tugas Pokok:

- a. Sebagai jabatan fungsional perencanaan, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengawasi system dan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, serta menyediakan analisis dan bahan teknis untuk pengambilan Keputusan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional dan kebijakan

Merancang rencana kerja teknis dan operasional di bidang perencanaan pendapatan daerah, mendistribusikan tugas kepada pejabat perencana sesuai kewenangan.

- b. Pengumpulan data dan analisis kebijakan

Merancang metode Kumpulan data terkait potensi penerimaan daerah, sumber keuangan, dan realisasinya.

- c. Perencanaan TI dan pengendalian system

Merencanakan penggunaan teknologi informasi untuk kelancaran system implementasi pendapatan.

- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Merencanakan pelaksanaan pengawasan teknis administrasi dan meteril diseluruh rangkaian penerimaan daerah.

5. Kepala bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan

Hazna, S.T

Tugas Pokok:

- a. Kepala bidang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, penilaian, dan penetapan pajak/retribusi daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional

Menyusun program kerja dan rencana teknis operasional untuk bidang ini.

- b. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pendaftaran, penilaian, dan penetapan pajak/retribusi, serta melakukan pengecekan dan supervise hasil pelaksanaan.

- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

Menyiapkan dan menjalankan kebijakan teknis di ketiga aspek utama pendaftaran, penilaian, dan penetapan pajak/retribusi.

- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasilnya, dan Menyusun laporan berkala tentang capaian bidang ini.

6. Kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan

Fiskal Dermawan, S.E

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis dibidang penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan wajib pajak, dan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis

Menyusun kebijakan teknis terkait penagihan pajak daerah, merumuskan prosedur penanganan keberatan atas ketetapan pajak, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah.

b. Pelaksanaan penagihan pajak

Melaksanakan penagihan piutang pajak dengan cara persuasive maupun represif (misalnya melalui surat tagihan, surat paksa, atau Lelang asset).

c. Pemeriksaan pajak daerah

Menyusun rencana pemeriksaan (deskaudit dan pemeriksaan lapangan).

d. Koordinasi dan evaluasi kegiatan bidang

Membangun sinergi dengan bidang lain dalam badan pendapatan daerah, serta instansi eksternal seperti inspektorat, kejaksaan, atau BPK.

e. Pembinaan dan pengawasan internal

Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf agar sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan.

7. Kepala bidang penerimaan

Indramiswati, S.E

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional

Menetapkan target dan strategi operasional terkait penerimaan daerah.

- b. Koordinasi dan fasilitasi

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar unit dibidang penerimaan dan fasilitasi pelaksanaannya agar sesuai instruksi dan regulasi.

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

Menyusun pedoman teknis pengelolaan penerimaan, termasuk pajak dan retribusi daerah.

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Memantau dan mengevaluasi realisasi penerimaan sesuai program.

e. Tugas tambahan dari atasan

Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai kebutuhan dan kewenangan.

8. Kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB

Iskandar, S.E., M.M.

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional

Menyusun dan merancang program serta rencana kerja operasional untuk PBB-P2 dan BPHTB

- b. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang, memfasilitasi staf, serta memeriksa hasil kerja di unit di lingkungan PBB-P2 dan BPHTB.

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

Menyusun pedoman teknis operasional terkait pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, hingga penanganan keberatan atas kewajiban PBB-P2 dan BPHTB.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program, termasuk penerimaan dan tindak lanjut, lalu Menyusun laporan berkala.

e. Pelaksanaan pelayanan dan penagihan

Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, serta penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB.

9. Kasubid pendaftaran dan pendataan

Mimi Sukmayansi, S.E.

Tugas pokok:

a. Membantu kepala bidang dalam merencanakan, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan pendaftaran serta pendataan objek dan subjek pajak daerah.

Fungsi:

a. Perencanaan dan penyiapan program

Menyusun bahan program kerja dan rencana operasional subbidang.

b. Koordinasi dan distribusi tugas

Mendukung koordinasi antar unit terkait dan mendistribusikan tugas kepada staf dan memberi petunjuk, membimbing, dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan.

c. Pendaftaran wajib pajak dan objek pajak

Melaksanakan dan mengawasi proses pendaftaran wajib pajak serta penghitungan dasar pendaftaran/pengenaan pajak (NPWPD, pengukuhan WP).

d. Pendataan dan pemuktahiran data

Pelaksanaan pengecekan lapangan dan penentuan zona/potensi objek (terutama PBB-P2).

e. Pengelolaan dokumen dan data administrative

Mengarsipkan surat-surat perpajakan, formular pendaftaran, serta dokumen pendukung dan administrasi formal.

10. Kasubid penagihan

Iswahyudi Gunuda, S.E.

Tugas pokok:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan semua kegiatan terkait penagihan, keberatan, dan penindakan atas pajak serta retribusi daerah.

Fungsi:

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Menyusun rencana kerja, program kegiatan, dan anggaran sub-bidang sesuai target Bapenda.

b. Penyusunan Kebijakan Teknis

Menyiapkan bahan kebijakan teknis untuk proses penagihan, penyelesaian keberatan, dan penindakan pajak/retribusi.

c. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan

Mengkoordinasikan dengan unit/unit lain dalam pelaksanaan tugas penagihan dan keberatan; memastikan sinkronisasi dan kelancaran operasional.

d. Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Retribusi

Menjalankan penagihan melalui penerbitan surat tagihan seperti SPPT, STPD, teguran, dan surat paksa; mengelola piutang dan penghapusan jika diperlukan.

11. Kasubid pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB

Nova Surya Dewi, S.E., M.S.i., Ak

Tugas pokok:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan pelayanan dan pendataan yang berkaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB.

Fungsi:

a. Perencanaan dan Pengorganisasian

Menyusun program kerja dan anggaran Sub-Bidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2/BPHTB.

b. Pendataan dan Pendaftaran

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan PBB-P2 dan BPHTB

c. Pelayanan Teknis dan Administratif

Memeriksa draft SKPD, SKPDKB, STTS, dokumen BPHTB dan memberi paraf, Koordinasi dengan kecamatan/desa untuk kelancaran pelayanan, termasuk pendistribusian SPPT dan STTS.

d. Pemutakhiran dan Verifikasi Data

Melaksanakan verifikasi dan validasi data wajib pajak serta objek pajak,
Memutakhirkan daftar induk wajib pajak dan data objek, serta pemeliharaan
basis data termasuk NJOP, ZNT, DBKB.

e. Monitoring dan Evaluasi

Mengidentifikasi hambatan operasional dan menyusun perbaikan.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas harian dan menyusun laporan Berkala.

12. Fungsional analisis keuangan pusat dan daerah

Yenni Meidarti, S.Sos

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis, monitoring,
dan evaluasi atas berbagai sumber keuangan daerah (PAD, belanja daerah,
dana perimbangan, pembiayaan, dekonsentrasi, tugas pembantuan, laporan
keuangan, rancangan dan perubahan APBD, serta sistem informasi
keuangan daerah).

Fungsi:

a. Data dan Laporan

Kumpulkan, verifikasi, dan olah data keuangan daerah (PAD, belanja, dana,
laporan, APBD, dll).

b. Analisis dan Rekomendasi

Analisis data untuk menghasilkan insight dan rekomendasi teknis terhadap
PAD, belanja, pembiayaan, dan lain-lain.

- c. Monitoring dan Evaluasi Pantau realisasi keuangan dan evaluasi efektivitas
program serta ketaatan prosedural.

d. Sistem Informasi Keuangan

Analisis kebutuhan sistem, buat konsep dan berikan rekomendasi pengembangan.

e. Advokasi dan Bimbingan Teknis

Sajikan dan sosialisasikan hasil analisis melalui makalah, artikel, sosialisasi, serta bimbingan teknis.

13. Fungsional analisis keuangan pusat dan daerah

Seti Alpeni, S.Sos

Tugas pokok:

- a. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis, monitoring, dan evaluasi atas berbagai sumber keuangan daerah (PAD, belanja daerah, dana perimbangan, pembiayaan, dekonsentrasi, tugas pembantuan, laporan keuangan, rancangan dan perubahan APBD, serta sistem informasi keuangan daerah).

Fungsi:

a. Data dan Laporan

Kumpulkan, verifikasi, dan olah data keuangan daerah (PAD, belanja, dana, laporan, APBD, dll).

b. Analisis dan Rekomendasi

Analisis data untuk menghasilkan insight dan rekomendasi teknis terhadap PAD, belanja, pembiayaan, dan lain-lain.

c. Monitoring & Evaluasi Pantau realisasi keuangan dan evaluasi efektivitas program serta ketaatan prosedural.

d. Sistem Informasi Keuangan

Analisis kebutuhan sistem, buat konsep dan berikan rekomendasi pengembangan.

e. Advokasi dan Bimbingan Teknis

Sajikan dan sosialisasikan hasil analisis melalui makalah, artikel, sosialisasi, serta bimbingan teknis.

14. Kasubid penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya

Ronny Triandi, S.STP., M.Si

Tugas pokok:

- a. Menyusun program dan rencana kerja Sub-Bidang terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Mengelola pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan wajib pajak (WP) dan wajib retribusi (WR) daerah lainnya.
- c. Menyusun dan merealisasikan target penerimaan PAD berdasarkan potensi daerah.
- d. Melakukan penghitungan, penerbitan, dan distribusi ketetapan pajak dan retribusi.
- e. Menyusun arsip dokumen perpajakan dan retribusi yang lengkap dan sistematis.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan koordinasi: menyiapkan bahan dan data untuk menyusun rencana operasional dan anggaran Sub-Bidang pajak/retribusi daerah.
- b. Pendataan dan penetapan: melakukan pendataan objek/subjek, menghimpun data potensi pajak/retribusi, serta menetapkan WP dan WR.

- c. Penghitungan dan penagihan: menghitung pajak/retribusi, menerbitkan surat ketetapan (SKPD/SKPR), mendistribusikan, dan melakukan penagihan/pemusatan penerimaan.
- d. Pelaporan dan evaluasi: menyusun laporan penerimaan, melakukan monitoring, evaluasi realisasi, dan menyiapkan bahan evaluasi kinerja Sub-Bidang.
- e. Pembinaan dan supervisi: mengawal dan membimbing tim/operator dalam proses pemungutan dan pelayanan pajak serta retribusi.

15. Kasubid penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Eradi Aswat, S.E.

Tugas pokok:

- a. Menyusun program kerja, rencana strategis, dan anggaran Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan visi-misi Bapenda dan arahan pimpinan.
- b. Menyiapkan bahan teknis kebijakan terkait penilaian dan penetapan PBB-P2 serta BPHTB.
- c. Melaksanakan penilaian objek dan subjek pajak PBB-P2/BPHTB (survei lapangan, verifikasi, penghitungan NJOP/NJKP).
- d. Menetapkan dan menerbitkan ketetapan pajak (SPPT, STPD, SKPD) atas PBB-P2 dan BPHTB.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Koordinasi: Merancang program tahunan, anggaran, serta pedoman teknis penilaian dan penetapan pajak.

- b. Penilaian dan Penetapan: Proses survei objek, verifikasi, penghitungan NJOP/NJKP, menetapkan SPPT (PBB-P2) dan STPD (BPHTB).
- c. Verifikasi SSPD: Memastikan kelengkapan dan keabsahan SSPD BPHTB sebelum penerbitan ketetapan.
- d. Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun bahan evaluasi, laporan progres, dan hasil kegiatan untuk pertanggungjawaban.
- e. Pengawasan dan Supervisi: Membina staf teknis, melakukan kontrol mutu, dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas

16. Kasubid penetapan dan pengolahan data

Desparinda, S.E.

Tugas pokok:

- a. Merumuskan program kerja, petunjuk teknis, dan anggaran Subbid berdasarkan visi-misi Bapenda.
- b. Mengelola pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data subjek/objek pajak daerah dan retribusi: entry data, profiling WP, evaluasi potensi, serta pembaruan NJOP/NJKP/ZNT/DBKB.
- c. Menghitung dan menerbitkan ketetapan pajak: SKPD, SKPDLB, SKPDN, serta validasi SSPD BPHTB.
- d. Menyusun profil dan daftar induk wajib pajak, termasuk perekaman dan dokumentasi data WP

17. Kasubid pemeriksaan

Loni Susmanti, S.Sos

Tugas pokok:

- a. Menyusun program kerja tahunan, petunjuk teknis, jadwal kegiatan, dan anggaran untuk Subbid Penetapan dan Pengolahan Data.
- b. Melakukan pengolahan data objek maupun subjek pajak daerah dan BPHTB (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): verifikasi, input data, dan pembaruan basis data.
- c. Menyusun target penerimaan PAD berdasarkan potensi pajak daerah yang telah diolah.
- d. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah serta manajemen dokumentasi data pajak.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Koordinasi: Merancang agenda pengolahan data, menyusun petunjuk pelaksanaan, serta mengoordinasi lintas unit untuk pelaksanaan tugas.
- b. Pengolahan Data dan Dokumentasi: Mengelola entri data pajak daerah dan BPHTB serta memelihara data wajib pajak dan database.
- c. Penetapan dan Validasi: Memberikan persetujuan (paraf) dan menginput ketetapan pajak seperti SPPT, SKPD, SSPD BPHTB, dan surat ketetapan lainnya.
- d. Laporan dan Evaluasi: Menyusun laporan berkala (monthly, quarterly), serta melakukan evaluasi dan rekomendasi perbaikan proses pengolahan data.

18. UPTD wilayah I

Kepala : Wandri, S.E.

Tugas pokok:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Pajak dan Retribusi Daerah lainnya (misalnya pajak air permukaan), serta menjalankan urusan ketatausahaan dan administrasi umum dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional terkait PKB, BBNKB, pajak air permukaan, dan retribusi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam pemungutan dan pelayanan di bidang tersebut.
- c. Pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak/retribusi di wilayah kerjanya.
- d. Perhitungan, penetapan, dan penagihan PKB, BBNKB, dan retribusi daerah lainnya.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penerimaan dan kinerja operasional.

Ka. TU

Suherman Yusuf, S.Pd., M.M.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbag Tata Usaha UPTD setiap tahun (renja, renstra, dan anggaran).
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan UPTD Wilayah 1.
- c. Menyiapkan naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan dokumen resmi serta surat-menyurat internal UPTD

- d. Mengelola operasional ketatausahaan, termasuk peralatan, aset, perlengkapan, dan fasilitas kantor
- e. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan anggaran dan kinerja pelaksanaan kegiatan

Fungsi:

- a. Perencanaan: Menyusun program kerja dan anggaran Subbag Tata Usaha secara operasional.
- b. Administrasi: Pengelolaan SDM, keuangan, aset, dan urusan umum harian.
- c. Ketatausahaan: Pengelolaan dokumen resmi, arsip, surat dinas, dan kearsipan.
- d. Monitoring dan Pelaporan: Pemantauan kinerja dan penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulan, tahunan).
- e. Pembinaan dan Koordinasi: Pengawasan internal Subbag dan koordinasi dengan unit lain UPTD/Bapenda.

19. UPTD wilayah II

Kepala: Dhody Octavia, S.E.

Tugas pokok:

- a. Pendaftaran, pendataan, dan penetapan objek/subjek pajak daerah (PKB, BBNKB, PAD non-pajak, BPHTB).
- b. Pelayanan langsung kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha internal di wilayah kerjanya.

Fungsi:

- a. Perencanaan Teknis Operasional Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran pelayanan pengelolaan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Menjalankan kebijakan teknis pelayanan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, retribusi, dan lainnya sesuai ketentuan.
- c. Pendataan dan Pendaftaran Melakukan survei, verifikasi, dan entri data objek/subjek pajak serta retribusi daerah.
- d. Penetapan dan Penagihan Menghitung, menerbitkan, dan mendistribusikan ketetapan pajak (SKPD, SPPT, SKPDLB, SKPDN), serta melakukan penagihan dan penanganan piutang.
- e. Monitoring, Evaluasi Pelaporan Memantau dan mengevaluasi realisasi penerimaan sekaligus menyusun laporan berkala yang akurat.

Ka. TU

Gushendri, S.Pd.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Subbag Tata Usaha agar sejalan dengan target dan kebijakan UPTD.
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan urusan umum/kerumahtanggaan UPTD Wilayah 2.
- c. Mengatur kearsipan, naskah dinas, dan surat menyurat, termasuk pengelolaan dokumen resmi
- d. Memfasilitasi pelayanan administrasi teknis dalam unit seperti pendataan, penetapan, dan penagihan pajak di wilayahnya.
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja kegiatan UPTD secara berkala.

Fungsi:

a. Perencanaan dan Program Kerja

Merancang program operasional, anggaran, dan kegiatan Subbag Tata Usaha.

b. Administrasi dan Ketatausahaan

Mengelola urusan kepegawaian, surat menyurat, arsip, inventaris, dan surat dinas serta kearsipan.

c. Keuangan dan Aset

Penatausahaan keuangan, pengadministrasian aset/inventaris, dan urusan rumah tangga UPTD.

d. Monitoring dan Pelaporan

Pemantauan kegiatan, penyusunan laporan keuangan, kinerja, dan evaluasi administrasi Subbag.

e. Pembinaan dan Koordinasi

Membina staf tata usaha, mengoreksi hasil administrasi, dan menjalin koordinasi dengan unit teknis maupun eksternal.

20. UPTD wilayah III

Kepala: Ferli Ramdani, S.E.

Tugas Pokok:

a. Pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan objek/subjek pajak (misalnya PKB, BBNKB, pajak air permukaan, PBB-P2, BPHTB).

b. Pelayanan langsung kepada masyarakat wajib pajak untuk keperluan administrasi dan pembayaran pajak.

- c. Urusan ketatausahaan internal, seperti administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kearsipan.
- d. Pelaporan dan evaluasi kinerja operasional penerimaan pajak wilayah 3
- e. Tugas penunjang lain sesuai arahan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Koordinasi Operasional Menyusun rencana kerja, program, dan anggaran teknis operasional pajak daerah.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Menjalankan kebijakan teknis dalam pengelolaan, penetapan, serta penerapan pajak/penerimaan daerah.
- c. Pendataan dan Pendaftaran Melakukan survei, verifikasi, dan entri data objek/subjek pajak daerah secara akurat dan terintegrasi.
- d. Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Menghitung kewajiban pajak, menerbitkan SKPD/SPPT, dan melaksanakan penagihan serta follow-up piutang.
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Melakukan pemantauan realisasi penerimaan, membuat laporan triwulanan/tahunan, dan melakukan evaluasi kinerja.

Ka. TU

Yuliati, S.T

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Subbag Tata Usaha UPTD setiap tahun sebagai bagian dari perencanaan operasional organisasi.

- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, umum, ketatausahaan, termasuk pengelolaan arsip, surat-menyurat, inventaris serta urusan rumah tangga UPTD.
- c. Menyiapkan dan menyusun naskah dinas, dokumentasi, serta bahan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran UPTD.
- d. Melaksanakan pengawasan internal, pembinaan staf TU, serta memastikan kelancaran administrasi pelayanan pajak di wilayah operasional.
- e. Koordinasi lintas unit, termasuk UPTD teknis dan instansi terkait, untuk mendukung operasional dan pelayanan pajak daerah.

21. UPTD wilayah IV

Kepala: Ade Hendra, S.T.

Tugas pokok:

- a. Pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak daerah (PKB, BBNKB, PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, retribusi daerah).
- b. Pelayanan langsung administrasi dan pembayaran wajib pajak;
- c. Ketatausahaan internal, meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, arsip, dan inventaris kantor;
- d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja realisasi pendapatan;
- e. Tugas penunjang lainnya sesuai arahan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Koordinasi Menyusun rencana operasional, program kerja, dan anggaran untuk wilayah 4.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Menjalankan kebijakan teknis pemungutan pajak kendaraan bermotor, BPHTB, retribusi, dan lainnya.

c. Pendataan dan Pendaftaran

Melakukan survei, verifikasi, dan entri data subjek/objek pajak serta retribusi.

d. Penetapan dan Penagihan

Menghitung kewajiban pajak, menerbitkan ketetapan seperti SPPT/SKPD, dan mengelola penagihan/piutang.

Ka. TU

Irfan Sepriyanto, D., S.STP., M.Si.

Tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Subbag Tata Usaha sesuai dengan target dan kebijakan UPTD.
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, aset, perlengkapan, dan urusan umum/kerumahtanggaan untuk menunjang operasional UPTD wilayah 4.
- c. Menyiapkan naskah dinas, kearsipan, dan surat-menyurat internal Subbag Tata Usaha UPTD wilayah 4.
- d. Memfasilitasi administrasi teknis dukung proses pendataan, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak di wilayah 4.
- e. Mengawasi dan membina staf Tata Usaha melalui monitoring dan koreksi hasil kerja administratif.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan Koordinasi

Penyusunan program kerja Subbag dan dukungan dalam penyusunan rencana kegiatan UPTD.

b. Administrasi dan Ketatausahaan

Penanganan administrasi kepegawaian, surat menyurat, arsip, inventaris, serta urusan ketatausahaan UPTD.

c. Keuangan dan Aset

Pengelolaan administrasi keuangan, inventaris, aset, serta urusan rumah tangga untuk UPTD wilayah 4.

d. Pelaporan dan Evaluasi

Penyusunan laporan operasional, administrasi, dan keuangan secara rutin.

22. UPTD wilayah V

Kepala: Ronal Wahyudi, S.T.

Tugas pokok:

- a. Pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan berbagai jenis pajak daerah (misalnya PKB, BBNKB, PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah, retribusi jasa umum).
- b. Memberikan pelayanan langsung administrasi dan pembayaran kepada wajib pajak.
- c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan internal, yakni administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dan pengelolaan aset.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan realisasi penerimaan.
- e. Melaksanakan tugas pendukung atau tambahan sebagaimana diarahkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

a. Perencanaan dan koordinasi operasional

Menyusun rencana teknis operasional, program kerja, dan anggaran pelayanan pendapatan daerah di wilayahnya.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis

Menerapkan kebijakan teknis pemungutan pajak (PKB, BBNKB, pajak air, retribusi, dsb) sesuai ketentuan pelayanan langsung kepada wajib pajak.

c. Pendataan dan pendaftaran

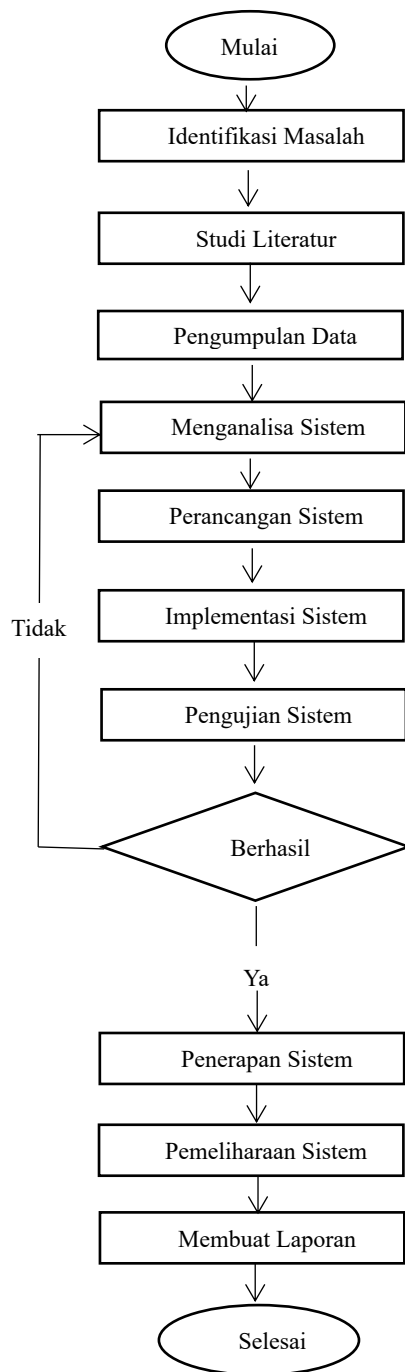
Melakukan survei, verifikasi, dan entri data terhadap objek/subjek pajak dan retribusi daerah.

d. Penetapan dan penagihan

Menghitung kewajiban pajak, menerbitkan surat ketetapan (SPPT, SKPD, dst), menagih pembayaran, dan menangani piutang.

3.2 Diagram Alur Penelitian

Diagram alur penelitian merupakan representasi visual yang menggambarkan setiap tahap yang ditempuh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Melalui diagram ini, alur kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil akhir dapat disajikan secara runtut dan mudah dipahami. Keberadaan diagram alur memudahkan pembaca untuk melihat proses penelitian secara lebih terstruktur, jelas, serta mengetahui keterkaitan antara langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi yang diteliti.



Gambar 3. 2 Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan gambar diagram alur penelitian di atas, tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Mulai

Tahap ini menjadi titik awal dari keseluruhan proses penelitian sebelum peneliti memasuki rangkaian kegiatan inti. Langkah ini menegaskan komitmen awal peneliti untuk menjalankan proses penelitian secara terarah.

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, peneliti mengamati kondisi yang terjadi di lapangan untuk menemukan permasalahan yang relevan. Identifikasi ini bertujuan menentukan fokus penelitian sehingga langkah penelitian yang ditempuh nantinya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata.

3. Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Tahap ini menjadi dasar pemikiran sekaligus membantu peneliti memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah yang paling sesuai.

4. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau teknik lain yang mendukung kebutuhan penelitian. Informasi yang terkumpul ini menjadi materi utama dalam menganalisis kebutuhan sistem pada tahap selanjutnya.

5. Menganalisa Sistem

Data yang telah dihimpun dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Analisis ini memastikan bahwa sistem yang akan dibangun benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ditemukan.

6. Perancangan Sistem

Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan awal sistem, meliputi diagram alur, UML, struktur basis data, desain antarmuka, hingga alur kerja sistem. Perancangan ini berfungsi sebagai rancangan awal yang menjadi panduan dalam proses pengembangan sistem.

7. Implementasi Sistem

Rancangan yang telah dibuat kemudian diwujudkan menjadi aplikasi nyata. Peneliti menuliskan kode program, menghubungkan basis data, serta membangun berbagai fitur sesuai desain dan kebutuhan pengguna.

8. Pengujian Sistem

Sistem yang telah dibangun diuji untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi performa, serta menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal.

9. Pemeliharaan Sistem

Setelah sistem berfungsi sesuai harapan, dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kualitas, memperbaiki kesalahan pada sebuah system, dan memastikan sistem tetap stabil saat digunakan dalam jangka panjang.

10. Membuat Laporan

Seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga pemeliharaan sistem, disusun dalam bentuk laporan skripsi sebagai bentuk dokumentasi resmi dan pertanggungjawaban akademik.

11. Selesai

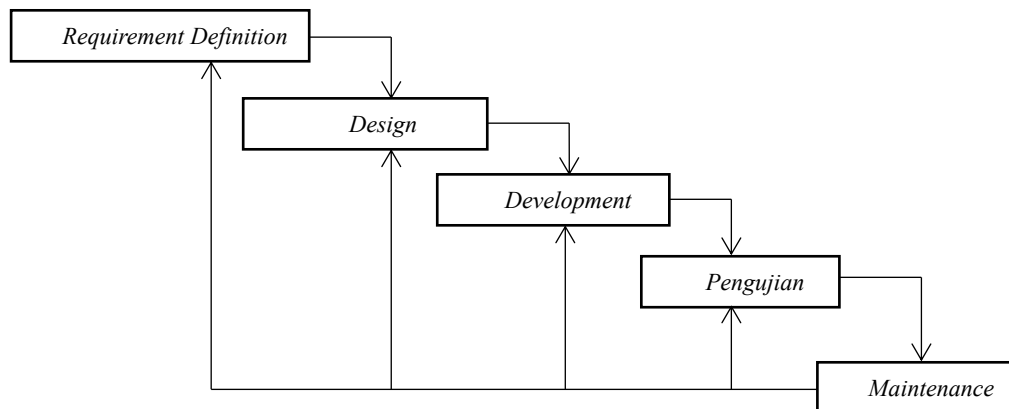
Tahap ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian penelitian, sekaligus menjadi penutup dari proses pengembangan dan pengujian sistem secara menyeluruh.

3.3 Metode Penelitian

Metode Waterfall merupakan sebuah proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, solusi dan merepresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi dan pengujian[11].

Waterfall merupakan model klasik yang memiliki sifat berurut dalam merancang software. Metode waterfall adalah hal yang menggambarkan pendekatan secara *sistematis* dan juga berurutan (*step by step*) pada sebuah pengembangan perangkat lunak. Tahapan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan yaitu *planning*, permodelan, konstruksi, sebuah *system* dan penyerahan sistem kepada pengguna, dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan[13].

Pemilihan metode ini dianggap sesuai karena kebutuhan sistem telah dapat ditentukan secara jelas sejak awal penelitian. Tahapan metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Metode Waterfall

1. Requirements Analysis

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna.

2. Design

Pada proses ini dilakukan proses desain rancangan sistem dengan menggunakan diagram UML antara lain use case, activity diagram, sequence, deployment dan rancangan database menggunakan entity relationship diagram dan logical record structure.

3. Development

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing.

4. Pengujian

Pengujian pada proses ini dilakukan tahap pengujian dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil menggunakan blackbox testing untuk pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada program berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh user.

5. Maintenance

Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis serta perancangan sistem informasi E-BPHTB. Penelitian ini menerapkan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih agar data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat mendukung proses perancangan sistem secara optimal.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai alur pelayanan, peran setiap petugas, serta hambatan yang muncul dalam pengolahan data BPHTB. Hasil

dari kegiatan ini menjadi acuan awal dalam menentukan kebutuhan sistem E-BPHTB yang akan dirancang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat dalam pelayanan BPHTB, seperti petugas verifikasi dan bagian administrasi. Teknik ini bertujuan menggali informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang sering terjadi, kebutuhan pengguna, serta harapan mereka terhadap penerapan sistem E-BPHTB. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui aspek-aspek penting yang tidak dapat ditangkap melalui observasi saja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen terkait BPHTB, seperti berkas permohonan, formulir verifikasi, laporan rekapitulasi, serta arsip administrasi yang digunakan dalam proses pelayanan. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi temuan dari observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dengan berakhirnya proses perancangan dan implementasi Sistem Informasi E-BPHTB, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan keberhasilan pembangunan sistem informasi ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis.

1. Sistem E-BPHTB ini akan meningkatkan proses layanan dan penginputan data BPHTB sehingga akan mempercepat pelayanan terhadap wajib pajak dan mengurangi kesalahan dalam penginputan data.
2. Sistem E-BPHTB sudah memiliki data NJOP dan BPHTB sehingga datanya akan terintegrasi dengan baik dan mempercepat proses verifikasi.
3. Sistem E-BPHTB ini akan menciptakan pelayanan yang transparan sehingga semua alur pelayanan akan dapat dimonitoring oleh wajib pajak.
4. Dengan pelayanan yang transparan menggunakan sistem online maka akan mengantisipasi dalam praktik pungutan liar.

6.2 Saran

Meskipun Sistem Informasi E-BPHTB telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan agar sistem menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis berharap kedepannya seiring penggunaan sistem, maka untuk dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga sistem dapat berfungsi dengan baik.
2. Dalam penerapan sistem E-BPHTB ini diperlukan pengguna yang kompeten dibidangnya sehingga akan memberikan kemudahan dalam pengoperasian sistem secara maksimal.
3. Penelitian ini masih terbatas dalam pengajuan BPHTB sehingga untuk kedepannya dapat dilakukan pengolahan data yang lebih menyeluruh yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Feybiola Horman, Daisy S.M. Engka, George M.V. Kawung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 23 No. 1 Bulan Januari 2023
- [2] Tsamarah Widad Wadhiah, Moh. Faisol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1 Bulan April – September 2023, E-ISSN 2723-6951
- [3] Sandy Wahyu Ramadany, Sarah Aulia Kaidar, Banly Aguchino, Chika Amelia Alira Putri, Ruiz Anggie. “Penerapan *UML Class Diagram* dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web,” *jurnal of Industrial and Engineering System (JIES)* e-ISSN: 2722-7979 Vol. 5 No. 1 Hal 30-41
- [4] Risma Lulu Zulia Maftukha, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muh. Afif Mahfud. “Dampak Perubahan Mekanisme Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Semarang Dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran Secara Elektronik.”
- [5] D. S. Ramdan. “Aplikasi desktop multi *platform* untuk *redis client* berbasis teknologi *web* menggunakan *framework electronjs dan reactjs*,” TEDC Vol. 14 No. 3, September 2020.
- [6] Agung Noviantoroa, Amelia Belinda Silvianab, Risma Rahmalia Fitrianic, Hanum Putri Permatasarid. “ RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SEWA LAPANGAN BADMINTON WILAYAH DEPOK BERBASIS WEB.” *Jurnal teknik dan science, JTS* Vol.1 No. 2 Juni 2022 P-ISSN: 2828-7002 E-ISSN: 2828-6871
- [7] Angga Adhinata Amrulloh, Maulidyati Aisyah. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan.” *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)* Vol.2, No.1 Januari 2024 e-ISSN : 2964-7800; p-ISSN : 2963-2307, Hal 202-211
- [8] Tsamarah Widad Wadhiah¹⁾, Moh. Faisol. “E-BPHTB: STRATEGI MENINGKATKAN PENERIMAAN BPHTB SELAMA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* E-ISSN 2723-6951 Vol. 4 No. 1 Bulan April – September 2023
- [9] Vivin Delvya Roza¹,Febri Yuliani², Adianto. “*Innovative Governance* Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Penerapan Aplikasi E-BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi).” *Jurnal JAPS* Volume 6, Nomor 1 April 2025 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601
- [10] Rahmad Ardhani, Muhammad Misbahul Munir, Aisyah Mutia Dawis. “Penerapan Metode *Waterfall* dalam perancangan sistem Informasi E-Learning Berbasis Web Pada Madrasah Tsanawiyah (MTS) AL-WUSHO Rumah Setia.” *Jurnal innovation and future Technology (IFTECH)*, Vol. 5, No.2, Tahun 2023 P-ISSN: 2656-1719 E-ISSN: 2656-2774

- [11] Jimmi Hendrik P. Sitorus, Muhammad Sakban “penerapan sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar.” *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, Vol. 5, No.2, Desember 2021 ISSN (print): 2686-6455, ISSN (online): 2686-5319
- [12] Hamid Kurniawan, Widya Apriliah, Ilham Kurniawan, Dede Firmansyah “PENERAPAN METODE WATERFAL DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA SMK BINA KARYA KARAWANG.” *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* P-ISSN : 1907-8420 E-ISSN : 2621-1106

